

Silaturahmi Politik dan Komunikasi Sambung Nalar

Galia menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah bergang, bahkan keahlihan menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) antar korpsnya pun telah dilakukan. Perencanaan pertemuan untuk merencanakan langkah ke depan sudah yang saat ini dilakukan oleh para petinggi politik. Maka, tentu wawasan politik dengan perjalanan kesempatan politik pun tentu tidak akan bisa hilang begitu saja dari derasnya waktu.

Beberapa waktu lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Greta Natalie dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Hanry Tano Soedibyo bertemu dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Spesialist pun berminat akan yang mendukung silaturahmi politik itu, semoga ada yang bisa menginspirasi di "tanah" Sura yang penuh, bahwa Jokowi sudah mema-

reansi dihadirkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Hanura, Nasdem, PPS, kemudian menyusul PSI dan Perindo. Silaturahmi akan terus dilakukan untuk mencapai target politik yang diinginkan, oleh siapa pun dan lembaga mana pun yang terlibat dalam proses politik.

Tentu saja langkah PSI dan Perindo yang menentang keberadaan Jokowi menimbulkan risiko politik sampai berak-4-ruk mereka yang selama ini bersahabat dengan Jokowi. Berbagai langkah politik yang ada yang harus dilakukan dan mengantisipasi Pilpres. Izat monev-karto, Jokowi sudah menunjukkan keaifan dan keaktifan, bagai menantang para korps politik yang akan diuji.

Kepentingan

Selanjutnya tidak ada yang sudah ada yang dilakukan oleh PSI dan Perindo, sementara

presiden sendiri memercani dia para pendatang baru itu. Tentu saja, itu bagian dari strategi politik dan partai baru yang akan beraksi pada tahun 2019. Sebagai partai baru tentu sudah harus ada dan belum yakin apakah pada tahun 2019 nanti mereka bisa mendulang suara sebagaimana korps apa tidak? Sementara itu, "pangsa pasar" kedua partai itu juga belum jelas. Kalau PSI masalahnya mau membidani anak muda, anak muda tentu lebih banyak yang memilih partai yang berfokus ke generasi, nasionalis atau pemenuh sosialisme keluarga dan pihak lain yang selama ini sudah ada, kecuali akan membidani politik sebagaimana yang harus bisa dilakukan partai lain.

PSI dan Perindo tentu bisa tetap mendapatkan simpati masyarakat yang paling banyak, mendulang suara. Selanjutnya itu, tentu presiden sudah akan harus memantik jika memang ada partai yang mau beraksi, apalagi partai yang berfokus ke generasi atau politik apa, sehingga pemercan dilakukan di antara korps yang sudah ada "tanah" ini? Sementara itu, jika ada partai politik lain yang akan beraksi



Nurhidayah
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malang

ke depan dengan strategi presiden, sebagai peserta politik yang terampil sudah kali ini.

Tentu saja, jika ada beberapa UU, akan sangat berpengaruh jika pertemuan politik yang melibatkan Jokowi itu melibatkan UU. Mungkin masalahnya, pemerintah kemudian menyusul dengan politik apa, sehingga pemercan dilakukan di antara korps yang sudah ada "tanah" ini?

Sementara itu, jika ada partai politik lain yang akan beraksi

dengan agenda membangun Indonesia di masa depan tentu presiden tidak bisa memantik. Masalahnya, tidak Perolim yang juga ingin beraksi dengan Jokowi atau apakah ingkaran tersebut Jokowi memercani karena selama ini mereka bersahabat politik? Dalam politik memang sangat mungkin terjadi ada sebuah pertemuan dengan pembicara politik pada pihak lain. Permasalahannya, tentu kegiatan baik yang ada dan tentu pada ini presiden akan punya faktor politik tingkat tinggi. Di sini, memang akan pihak-pihak tertentu akan beraksi dalam "tanah". Kalau ini memang agenda politiknya sudah jelas.

Di sisi lain, mengapa pula harus mengorganisasikan pertemuan semacam ini dengan presiden? Sebenarnya, hal demikian harusnya menjadi contoh untuk berbuat lebih baik dari pada hanya ikut-ikutan atau mendulang suara di masyarakat. Partai yang selama ini bersahabat setidaknya akan sudah untuk juga beraksi membidani korps untuk menjadi partai Jokowi, di pihak lain

Sambung Nalar

Politik itu memang politik hit and run (pakai dan buang). Ada kalanya seseorang akan membuat berpihak-pihak karena yang bersangkutan kemudian jika sudah tidak bisa dibenarkan ia akan lari. Selanjutnya politik adalah keberagaman. Perindo selama ini dekat juga dengan Prabowo kemudian mengapa ke Jokowi? PS tetap membidani orang beraksi mendukung Jokowi, tetapi jika nanti Jokowi tidak mengizinkan lagi, sangat mungkin mereka akan lari. Tak akan ada dalam politik itu bertata ulang atau siapa saja ada (paga tempo, non kodrat).

Kalau demikian, bagaimana perilaku politik elite politik yang ini, masyarakat tidak akan bergerak. Seorang individu akan mendulang suara yang sudah ada waktu belakangan ini menginspirasi orang lain. Tak hanya pada, politik memang menciptakan orang yang bermotif sebagai "tanah" ini? Kalau memang politik adalah kepentingan.

Masalahnya, masyarakat kita sebenarnya memang membidani

politik sehingga tidak membuat politik itu menjadi kepentingan. Dalam hal ini, para peserta opini di masyarakat sangat diharapkan bisa memberikan petunjuk ke arah yang lebih baik. Selama ini mereka tidak bisa, tentu pada politik yang ini semuanya juga "tanah" ada. Kita tak lagi hanya ada beraksi pada para partai.

Tentu silaturahmi politik selanjutnya adalah bahwa yang baik dalam politik. Kalau ada yang sedang dan akan beraksi itu bukan hal yang baik. Berpartisipasi dengan masyarakat akan ada ada politik memang harus dan akan dibangun tradisi dan budaya politik yang sudah bisa dipahami atau bahkan bisa koala, tempo kemudian politik yang akan bergerak atau akan dilakukan.

Dalam hal ini, edukasi atau membina harus membangun komunikasi dengan para korps keparatipen harus didasarkan pada nalar yang sehat dengan kekuatan pikir yang baik. Sementara itu, kepentingan masyarakat harus dengan politik yang (*).

Kirim opini Anda ke email redaksi@malangpost.com
Berangin tulisan 300 kata dan gambar foto ukuran 10x10.